



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURIANSYAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **74637**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.493.456.800**

1. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.403.400
2. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.403.400
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6150 m2/72 m2 di KAB / KOTA MALINAU, HASIL SENDIRI Rp. 37.600.000
4. Tanah Seluas 22500 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1680 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.068.800.000
6. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 6896 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 365.960.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



3. MOTOR, KAWASAKI LX150H Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
21.960.000
4. MOTOR, BENELLI BS 250 PE MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.489.886.373

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.361.803.173

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.361.803.173

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.